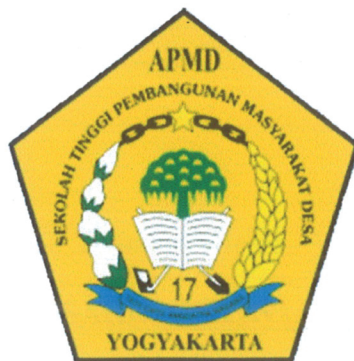


**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**



Disusun Oleh :

ROSARIA OKTAVIANI

20520050

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**



**Disusun Oleh :
ROSARIA OKTAVIANI
20520050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Februari 2024
Waktu : 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping I

Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

YOGYAKARTA

Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rosaria Oktaviani
Nomor Induk Mahasiswa : 20520050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur Dalam Percepatan Pembangunan”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan


Rosaria Oktaviani
20520050

HALAMAN MOTO

“Kamu Adalah Garam Dunia”

(Matius 5:3)

“Marilah Kepada-Ku Semua Yang Letih Lesu dan Berbeban Berat

Aku Akan Memberi Kelegaan kepadamu”

(Matius 11:28)

“Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan

Kamu Akan Menerimanya”

(Matius 21:22)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul Strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur Dalam Percepatan Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini :

1. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Terimakasih kepada Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,M.Si yang telah membimbing saya dengan sabar dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Martinus Pagon, ibu Nyonya terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan doa dan dukungan selama proses dalam mengerjakan skripsi tanpa kalian Vani tidak akan kuat menjalankan semua ini.
6. Terimakasih kepada kakak-kakak saya alm. Yanti Emiliana, Evidius Darminto, Leni Febuani, Eta Prengky, Monika Asmirinda, Clara Jusa Hadel

yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses mengerjakan skripsi.

7. Terimakasih kepada keponakan-keponakan saya Evi Yola Viani, Evan Chandra, Novia Adelia, Abelia, Belva Aorora, Risyia Kunigunde, Reza, Helsi telah memberikan semangat serta dukungan selama proses skripsi.
8. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tri Nugroho telah memberikan pengarahan, motivasi, dukungan dan doa selama proses skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya Rosmaida Manurung, Yohana Ayu Rosari, Litansia Yonika, Indra Gunawan, Raymondus Jeans yang telah berteman dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya, serta menemani setiap proses pendidikan saya di Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada Sirilus Rovi yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sebagai tempat keluh kesah saya
11. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menumpuh studi.
12. Terimakasih kepada Lurah Condongcatur Bapak Reno Candra Sangaji S.I.P., M.IP dan seluruh Perangkat/Pamong Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan skripsi ini. Dan saya minta maaf mungkin selama melakukan penelitian sikap, tingkah laku dan juga kata-kata saya yang tidak mengenakan untuk Bapak/Ibu di Kalurahan Condongcatur.

Yogyakarta, 05 Februari 2024

Penulis

Rosaria Oktaviani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GRAFIK.....	ix
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
a. Tujuan Penelitian	9
b. Manfaat penelitian	9
E. Kajian literatur.....	10
F. Kerangka Konseptual	22
1. Pemerintah dan Pemerintahan	22
2. Pembangunan.....	25
3. Strategi.....	33
4. Governmentality	36
G. Metode Penelitian	38
1) Jenis penelitian.....	38
2) Sumber Data	38
3) Informan Penelitian.....	39
4) Teknik Pengumpulan Data.....	40
5) Teknik Analisa Data.....	43
BAB II GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....	45

A.	Gambaran Umum Kalurahan Condongcatur	45
1.	Sejarah	45
2.	Visi dan Misi	46
3.	Struktur Organisasi	48
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	49
5.	Kondisi Geografis	55
6.	Kondisi Demografis	58
7.	Kondisi Ekonomi	61
B.	Program-Program Pembangunan di Kalurahan Condongcatur.....	68
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		74
A.	Deskripsi Informan	74
B.	Analisis Strategi Pemerintah Condongcatur dalam Percepatan Pembangunan	74
1.	Analisis Tujuan	75
2.	Analisis Lingkungan	80
3.	Analisis Pengarahan.....	85
4.	Analisis Tindakan	88
5.	Analisis Pembelajaran.....	94
C.	Faktor Yang Mendukung Percepatan Pembangunan Berbasis Rukun Warga..	96
a)	Pemerintah Condongcatur.....	97
b)	Partisiapasi masyarakat.....	99
c)	Lembaga Kemasyarakatan Desa	100
d)	Pendanaan dari pemerintahan	101
e)	Swadaya Masyarakat	111
D.	Pembahasan	112
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		119
PEDOMAN WAWANCARA		124
DAFTAR OBSERVASI		126
LAMPIRAN-LAMPIRAN		127

DOKUMENTASI.....	129
------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabulasi Literature Review	15
Tabel 1. 3 Data Informan	40
Tabel 2. 1 Luas Kalurahan Condongcatur	56
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan	59
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 2. 4 Mata Pencarian Penduduk	61
Tabel 2. 5 Jumlah Fasilitas Pendidikan	64
Tabel 2. 6 Jumlah Fasilitas Rumah Peribatan	65
Tabel 2. 7 Jumlah Fasilitas Kesehatan	66
Tabel 2. 8 Jumlah Fasilitas Umum	67
Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Perekonomian	67
Tabel 3. 1 Analisis Strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Percepatan Pembangunan dalam Perspektif Governmentality	115

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur	48
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Penduduk Berdasarkan Agama	58
Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	59

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Condongcatur dalam percepatan pembangunan, tujuan pembangunan berbasis RW, perubahan yang terjadi dengan adanya pembangunan berbasis RW, pengarahan dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, tindakan dalam pengambilan, dan juga evaluasi atau pembelajaran yang dilakukan Pemerintah Condongcatur. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh; (1) Tujuan pembangunan berbasis RW ini guna untuk mempercepat proses pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Adapun bantuan dana kepada 64 RW adalah sebesar Rp. 40.000.000 per tahun; (2) perubahan lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan berbasis RW baik pembangunan fisik maupun non-fisik membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, tidak hanya terjadi pada perubahan lingkungan tetapi juga berpengaruh pada kesehatan dan perekonomian masyarakat; (3) dalam melakukan pengarahan Pemerintah Condongcatur melakukan koordinasi dengan stakeholders Kalurahan dan juga pihak-pihak yang terkait guna untuk menyampaikan visi dan misi program kerja Lurah dan juga memberikan pemahaman yang sama guna untuk pelaksanaan program-program sesuai dengan visi dan misi; (4) tindakan Pemerintah Condongcatur dalam pengambilan kebijakan, melakukan diskusi bersama stakeholders Kalurahan mengenai kebijakan yang tepat untuk percepatan pembangunan, setelah itu melakukan musyawarah perencanaan program yang akan dilaksanakan, pelaksanaan program, dan memonitoring serta evaluasi; (5) pembelajaran yang dimaksud yaitu dimana dengan perubahan percepatan pembangunan berbasis RW ini, sebelumnya di Kalurahan Condongcatur menggunakan berbasis Padukuhan dianggap kurang cepat, kurang efisien dan kurang merata. Maka dari itu, melakukan evaluasi dari kebijakan sebelumnya dan pembangunan berbasis RW ini solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan berbasis Padukuhan. Pembangunan berbasis RW di Kalurahan Condongcatur telah sesuai dengan Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

Kata Kunci ; Strategi, Percepatan Pembangunan, Rukun Warga

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang identik dengan tempat memiliki alam yang masih asri. Selain memiliki alam yang asri, secara geografis desa juga jauh dari pusat perkotaan. Desa juga disebut sebagai suatu hal perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang saling bergotong royong. Kebiasaan tersebut merupakan tanda masyarakat desa memiliki jiwa sosial yang saling berinteraksi dan bergantung satu dengan yang lainnya. Pengertian Desa menurut Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 menyebutkan bahwa, Desa atau yang sering disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan nasional, dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan tolak ukur tercapainya tujuan pembangunan nasional karena pemerintah desa dalam organisasi nasional sebagai faktor penggerak utama bagi pengelolaan sumber-sumber daya yang ada di wilayahnya dalam mendorong tercapainya tujuan nasional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa yaitu sebagaimana Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penyelenggara pemerintahan desa dalam sistemnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dikarenakan pemerintah desa sebagai unit yang paling dekat dengan masyarakat yang mengetahui kondisi lingkungan masyarakat secara langsung dan juga pemerintah desa tau apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Dengan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang sejahtera, adil, tenteram, aman dan damai.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak terpisah dari otonomi daerah dan pemerintah desa yang merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Hal tersebut merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, dalam Peraturan Pemerintah Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, atau pembelajaran.

Dalam rangka pemberdayaan itu sendiri pemerintah desa diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Hal tersebut, bertujuan

agar pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang lebih prima serta pemberdayaan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.

Dengan pembangunan yang menjadi kegiatan masih terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat dilihat dari proses perubahan dalam rangka mencapai tujuannya. Pembangunan merupakan proses yang melibatkan banyak aspek, meliputi perubahan dinamika sosial, perubahan perspektif masyarakat terhadap kehidupan, dan perubahan pada sistem hukum, politik dan juga pemerintahan. Dalam mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah harus memberikan perhatian yang relatif besar terhadap perdesaan karena di Indonesia masih banyak desa yang membutuhkan pembangunan yang besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sebagai suatu proses, yaitu kegiatan terus menerus dilaksanakan dalam tahap-tahap tertentu yang mengarah pada modernitas untuk mencapai tujuan Negara.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi tujuan pembangunan desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan juga kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas desa dll untuk mengurangi infrastruktur, dan memanfaatkan SDA dan ekologi yang berkelanjutan. Pembangunan desa yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta, dalam pembangunan desa yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini. Dengan demikian, untuk membangun kemandirian desa dalam kerangka “desa membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula.

Dalam menyusun rancangan pembangunan pemerintah desa melibatkan warga masyarakat dalam bentuk musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan media atau forum untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Perencanaan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahunnya yang dilakukan pemerintah desa disusun secara berjangka.

Sesuai dengan Undang-Undang Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya secara berjangka :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih. Dalam dokumen tersebut, memuat kebijakan pembangunan desa mewujudkan visi dan misi kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa “Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang merupakan tugas utama atau kegiatan bersama membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Oleh karena itu,

dalam memenuhi keperluan pembangunan yang besar dari sumber daya yang ada maka perencanaan sangat dibutuhkan agar proses pembangunan nasional dapat meraih tujuan pembangunan secara maksimal seperti yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya agar arah pembangunan yang terbatas dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan efisien.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan terutama dalam bidang pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dari Keistimewaan tersebut, menjadikan perbedaan antara daerah Yogyakarta dengan daerah lainnya. Dimana Keistimewaan Yogyakarta dalam bidang pertanahan, tanah Kasultanan yang lebih dikenal dengan istilah *Sultanaat Gronnd* (SG) dan tanah Kadipaten yang dikenal dengan istilah *Pakualamanaat Gronnd* (PAG) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta Pasal 32 ayat (5) menyatakan bahwa “Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat”. Merujuk pada Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY, tidak hanya memiliki Keistimewaan pertanahan tetapi yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat 5 (lima) kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai berikut;

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan;
5. Tata ruang.

Kalurahan yang merupakan sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Termasuk juga dengan Kalurahan Condongcatur terdiri dari 18 Padukuhan, 64 Rukun Warga (RW), dan 211 Rukun

Tetangga (RW). Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset Kalurahan sehingga berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Dalam melakukan percepatan pembangunan, Pemerintah Condongcatur menetapkan pembangunan berbasis Padukuhan guna untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah Kalurahan yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat Desa yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk melakukan pembangunan yang merata di segala bidang kehidupan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat yang mengutamakan potensi yang dimiliki oleh Kalurahan. Pembangunan potensi Kalurahan ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, karena merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat di semua aspek. Namun pada realitanya, percepatan pembangunan berbasis Padukuhan sudah berjalan dengan baik, tetapi dikarena Kalurahan Condongatur memiliki wilayah yang luas sehingga perlu upaya lebih lagi dalam mengoptimalkan percepatan pembangunan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lainya terbatasnya dana pada setiap pada padukuhan, perbedaan luas wilayah, jumlah Rukun Warga yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, serta tingkat kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan swadya. Selain itu, mengingat Kalurahan Condongcatur telah menjadi kawasan ramai dengan kegiatan usaha, baik oleh warga sendiri maupun warga dari luar Kalurahan, dan terdapat banyak warga yang bekerja di luar kawasan, serta pendatang-pendatang para pelajar yang menuntut ilmu ke Yogyakarta dan tinggal di kawasan Kalurahan Condongcatur.

Dikutif dari laman resmi Pemerintah Condongcatur pada saat menggelarkan Musyawarah Kalurahan penyusunan RPJMKal Tahun 2022-2027, Selasa 16 November 2021. Dalam sambutan Lurah Condongcatur yaitu Reno Candra Sangaji, S.IP menyampaikan bahwa arah pembangunan Kalurahan Condongcatur baik fisik

maupun nonfisik selama 6 tahun kedepan berbasis RW. Lurah Condongcatur juga mengharapkan Kerjasama dan sinergi yang baik dari semuanya sehingga masyarakat nanti dapat merasakan adanya perbedaan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program-program pembangunan “ semua rencana itu bagus tetapi lebih baik lagi jika semua rencana dapat direalisasikan dengan anggaran dan pembiayaan yang tepat sehingga tidak ada kesalahan dan kerugian ataupun penyelewengan anggaran”.

Oleh karena itu, untuk melakukan percepatan pembangunan oleh Pemerintah Condongcatur memutuskan mengubah konsep percepatan pembangunan berbasis Padukuhan menjadi berbasis Rukun Warga (RW). Dengan perubahan tersebut bertujuan agar ada percepatan pembangunan di Padukuhan dimasing-masing RW, prinsipnya adalah pemerataan pembangunan berdasarkan partisipasi warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada lagi jalan yang rusak dan fasilitas warga lainnya semua dapat terpenuhi dengan baik dan jauh kedepan jika pembangunan fisik semua sudah baik dan selesai dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan maupun program lainnya untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi masyarakat.

Di lihat dalam perspektif ilmu pemerintahan peneliti mengambil perspektif Governmentality. Menurut Michel Foucault Governmentality terdiri dari konsep pemerintahan dan rasionalitas. Pemerintah dalam pengertian ini mengacu pada perilaku, atau aktivitas yang dimaksudkan untuk membentuk, membimbing, atau mempengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku memiliki makna di luar bentuk memimpin dan mengarahkan. Hal ini juga mengacu pada “perilaku diri sendiri” di mana rasa mengatur diri sendiri adalah kekuatan yang membimbingnya. Rasionalitas yang merupakan suatu bentuk pemikiran yang berusaha sistematis dan jelas tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi atau seharusnya terjadi, menyatakan bahwa sebelum orang atau sesuatu dapat dikendalikan atau dikelola, terlebih dahulu harus didefinisikan.

Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan, rasionalitas dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Pemerintah harus mendasarkan keputusannya pada pemikiran yang rasional dan terinformasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dengan demikian, sebelum pemerintah dapat mengendalikan atau mengelola suatu situasi atau entitas, mereka perlu memiliki definisi yang jelas tentang objek yang akan mereka atur, serta pemahaman yang rasional tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelolanya. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan, analisis, dan pemikiran yang cermat dalam proses pengelolaan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan diatas, strategi percepatan pembangunan berbasis Rukun Warga jarang ditemukan atau digunakan oleh Desa atau Kalurahan lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembangunan berbasis Rukun Warga di Kalurahan Condongcatur. Maka dari itu, peneliti merumuskan rumusan penelitian sebagai berikut; bagaimana strategi Pemerintah Condongcatur dalam melakukan percepatan pembangunan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian sebagai pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan. Berdasarkan latar belakang di atas, menurut PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa “Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 bidang pembangunan yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut untuk mengetahui strategi yang dilakukan

oleh Pemerintah Condongcatur, peneliti merujuk pada konsep yang disampaikan oleh Geoff Mulgan (2009) dengan melihat pada 5 indikator yaitu ;

1. Tujuan (*Purposes*), untuk mengetahui mengapa Pemerintah Condongcatur ingin melakukan percepatan Pembangunan
2. Lingkungan (*Environments*), untuk mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi dengan adanya percepatan pembangunan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perubahan dari berbasis Padukuhan beralih beralih Rukun Warga
3. Pengarahan (*Directions*), hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh RW dalam Menyambut kebijakan pemerintah Condongcatur yang berbasis Rukun Warga
4. Aksi (*Action*), untuk mengetahui tindakan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis Rukun Warga
5. Belajar (*Learning*), untuk mengetahui kegiatan atau pelatihan apa saja dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis Rukun warga

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. untuk mengetahui strategi pemerintah kalurahan dalam pembangunan berbasis Rukun Warga di Kalurahan Condongcatur
2. untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam percepatan pembangunan berbasis Rukun Warga

b. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut;

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam bidang pengetahuan dan menjadi referensi bagi para akademis yang tertarik dalam konsep perencanaan pembangunan ditingkat Desa atau Kalurahan berbasis Rukun Warga.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Condongcatu, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merealisasikan strategi percepatan pembangunan Kalurahan Condongcatu berbasis Rukun Warga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pembelajaran, pemahaman, dan kesadaran mengenai pentingnya mengetahui strategi pemerintah desa dalam pembangunan yang berbasis Rukun Warga.

E. Kajian literatur

Penelitian tentang strategi pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat desa bukan merupakan hal yang baru didengar atau diteliti oleh peneliti lainnya. Penelitian-penelitian telah berupaya menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melakukan pembangunan yang merata agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan di masyarakat, sebagai berikut;

- 1) Penelitian Kasmira, Alyas, Sudarmi pada Tahun 2020 yang berjudul “Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa”. Menemukan bahwa Strategi Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik karena dari sisi sumber daya manusia, efektifitas, tujuan sudah maksimal sesuai tanpa pemborosan (tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Strategi sangat dibutuhkan didalam suatu pembangunan ataupun didalam suatu program. Strategi merupakan suatu

perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh R. Sabrina pada tahun 2022 yang berjudul “Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat” Jurnal ini bersisi tentang pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah yang berbasis partisipasi masyarakat. Penting adanya partisipasi Masyarakat terlibat dalam Pembangunan. Perlibatan masyarakat sendiri merupakan sarana dalam menggali dan memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Keterlibatan publik harus menjadi nilai tambah untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperoleh melalui sejumlah jurnal dan hasil penelitian yang relevan serta dari buku-buku yang terkoneksi dengan fokus kajian.
- 3) Penelitian Wafiq Laelatul Kodrianingsih dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Desa Aikmel” Jurnal ini menjelaskan dalam strategi Pemerintah Desa Aikmel untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa membuat beberapa bentuk tindakan yang penting untuk partisipasi masyarakat yaitu peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pemerintah desa harus meningkatkan partisipasi masyarakat, dimulai dengan petisi dan diakhiri dengan pembuatan program dimana masyarakat memiliki kepentingannya masing-masing dalam setiap program. Jurnal ini juga menjelaskan bahwasanya indikator agar tercapainya indikator yang sudah di tentukan yaitu tujuan, lingkungan, pengarahannya,

Tindakan, pembelajaran. Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. dapun Teknik pengumpulan data yang digunakn ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

- 4) Penelitian Asdar Mono, Rijel Samaloisa pada tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman” Jurnal ini berisi tentang partisipasi masyarakat Kalurahan Condongcatur dalam Pmebangunan Desa. Sebagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarkat dalam pembangunan Kalurahan Condongcatur, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang berperan penting dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Media sosial yang biasanya digunakan adalah whatsapp group, facebook, dan instagram. Penggunaan media sosial ini dapat digolongkan kepada public space. Partisipasi sangat terkait dengan keterlibatan semua pihak secara sadar dalam suatu proses pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu seluruh proses hendaknya melibatkan semua pihak dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan bersama. Partisipasi sangat didasari oleh tujuan untuk menghargai harta dan martabat manusia sebagai mahluk. Perlunya meningkatkan kualitas dialog dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Condongcatur dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dialog pada saat Musrebangdes, dan forum-forum lain untuk mendorong partisipasi masyarakat agar lebih tertarik untuk menyampaikan aspirasi mereka. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan peneliti ini
- 5) Penelitian oleh Hastra Aminoto Laila, Andi Randhika Perangin-angin pada tahaun 2020 yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi” Jurnal ini menjelaskan

usaha melibatkan masyarakat dalam pembangunan dalam artiannya bahwa pengelola pembangunan di desa adalah masyarakat desa itu juga yang berorientasi pada potensi pajak yang ada di desa yang mengarahkan masyarakat untuk mandiri. Berdasarkan pengertian diatas, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sudah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Hal ini menjadi indikator bagaimana mengukur kemampuan masyarakat itu dalam mengidentifikasi masalah di desanya dan mencari solusi dan melakukan perubahan sehingga masyarakat dapat menikmati sendiri hasil pembangunan yang telah mereka lakukan. Peran pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat, melaksanakan perannya dalam meningkatkan partisipasi yang Mengacu kepada PP No. 43 tahun 2014 dan Permendagri No.113/tahun 2014 terkait Pembangunan Desa maka Pemerintah Desa telah menerapkan Pembangunan Desa dalam 3 tahap yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

- 6) Penelitian oleh Ahmad. H, Abdul Rajab, Muh. Marwan Malik pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur”. Jurnal ini menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan keamanan dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan pedesaan diperlukan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dan terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan, dan ketersediaan berkorban untuk keberhasilan yang bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara secara terstruktur dengan pedoman wawancara dengan informan. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sedangkan pengolahan data penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

- 7) Penelitian oleh Heppy Sondakh, Michael Mantiri, Ventje Kasenda pada tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Tabel 1. 1 Tabulasi Literature Review

Nama Penelitian	Kasmira, Alyas, Sudarmi	R. Sabrina	Wafiq Laelatul Kodrianingsih, Rispawati, Bagdawansyah Alqadri	Asdar Mono, Rijel Samaloisa	Hastra Aminoto Laia, Andi Randhika Perangin-angin	Ahmad. H, Abdul Rajab, Muh. Marwan Malik	Heppy Sondakh, Michael Mantiri, Ventje Kasenda
Judul Penelitian	Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dikabupaten Gowa	Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisiapasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Desa Aikmel	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcaur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Mangnan Molih Kecamatan	Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan

					Tanah Pinem Kabupaten Dairi		
Identitas Jurnal (nama, Volume, No)	Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020)	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Volume 22 Nomor 1 Tahun 2022)	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Volume 6 Nomor 7 2023)	Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022)	Jurnal Governance (Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020)	Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Managemen (Volume 19 Nomor 3 Tahun 2023)	Jurnal Governance (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021)
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah dalam Pembangunan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Pembangunan berkelanjutan di era otonomi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masayarakat untuk membangun desanya sendiri dan agar menjadi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam membangkit semangat	Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak yang telah dipilih Masyarakat terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam Pembangunan

	jalan di Kabupaten Gowa	daerah berbasis partisipasi masyarakat	masyarakat terhadap Pembangunan desa, serta factor-faktor penghambat dan mendukung dalam proses pelaksanaan Pembangunan	lebih baik serta keterlibatan Masyarakat harus aktif dalam Pembangunan	masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Mangan Molih	perkembangan ekonomi dikawasan perdesaan	infrastruktur di desa
Metodologi	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data observasi,	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperoleh melalui sejumlah	Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.	penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan mengambil studi kasus di Desa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif

	wawancara dan dokumentasi	jurnal dan hasil penelitian yang relevan serta dari buku-buku yang terkoneksi dengan focus kajian	Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi	melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan peneliti ini. Pemerintah kalurahan Condongcatur		Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara secara terstruktur dengan pedoman wawancara dengan informan	
--	---------------------------	---	---	--	--	---	--

Persamaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan untuk masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dimana dalam pembangunan tersebut bertujuan untuk keikutsertaan partisipasi dari Masyarakat dalam meningkatkan pembangunanan	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah dalam Upaya atau strategi Pemerintah desa dalam Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembangunan Desa dengan memperhatikan kondisi	Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian yang berada di Kalurahan Condongcatur	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan Pembangunan sesuai secara procedural dan pentunjuk pelaksanaan Pembangunan, serta melibatkan Masyarakat untuk aktif terlibat	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama berupaya dalam Pembangunan infrastruktur desa seperti halnya jalan, rumah ibadah, layanan Kesehatan dan lain-lain guna meningkatkan	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah Upaya pemerintah desa dalam peningkatan kualitas hidu[dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.
-----------	---	---	---	--	---	---	---

			lingkungan masyarakat		dalam pembangunan	taraf hidup masyarakat	
Perbedaan	Perbedaan terletak pada tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Gowa dan penelitian sekarang terletak di Kalurahan Condongcatur, dan pada penelitian sekarang dimana Pembangunan	Perbedaanya adalah terletak pada pengumpulan data dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara penelitian terdahulu menggunakan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sebuah inovasi Pembangunan yang sudah berbasis Rukun Warga yang ada di Kalurahan Condongcatur	Perbedaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membaha tentang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Condongcatur.	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah Langkah yang dilakukan pemerintah desa. Pada penelitian terdahulu Langkah yang dilakukan pemerintah desa Mangan Molih adalah dengan memberikan	Letak perbedaan kedua penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah	Perbedaan anatera kedua penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekan pada keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara

	sudah berbasis RW	penelitian studi Pustaka		Sedangkan penelitian sekarang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam Pembangunan yang berbasis Rukun Warga	kewenangan kepada dusun untuk melaksanakan Pembangunan. Sedangkan penelitian sekarang sudah berdalih dari Padukuhan menjadi Berbasis Rukun Warga		penelitian sekarang menjelaskan strateegi pemerintah dalam pembangunan
--	----------------------	-----------------------------	--	--	---	--	---

Sumber : Data penelitian 2022

Dari penelitian-penelitian diatas memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dahulu juga sama-sama mencoba menjelaskan strategi pemerintah dalam pembangunan ditingkat desa dimana para peneliti menjelaskan tahap-tahapan perencanaan pembangunan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan serta evaluasi pelaksanaan rencana, guna untuk mengetahui proses perencanaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Namun, yang menjadi perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada Pembangunan terdahulu berbasis kabupaten dan tingkat desa. Sementara pada penelitian ini menganalisis pembangunan berbasis Rukun Warga. Dimana hal tersebut merupakan inovasi baru guna untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Penelitian ini juga memiliki kesamaan tempat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Asdar Mono, Rijel Samaloisa pada tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman”. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat Condongcatur. Sedangkan penelitian ini fokus pada staretegi pemerintah dalam Pembangunan berbasis Rukun Warga.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah dan Pemerintahan

1) Pemerintah

Secara umum pemerintahan yang diselenggarakan mempunyai dua fungsi utama, yaitu: fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (services), dalam kaitannya dengan dua fungsi tersebut, suatu negara bagaimanapun bentuknya dan seberapa pun luasnya wilayah, tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral (terpusat) secara terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi

distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah (Sarundajang, 2000:16).

Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Kemudian pengertian pemerintahan desa dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) bahwa “Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Philipus (2005) memberikan pendapat lain mengenai pemerintah, yaitu pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian, disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintah” (kegiatan pemerintah), dilain pihak dalam arti “organisasi pemerintah” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah). Fungsi pemerintah ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintah, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.

2) Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yang menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.

Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini. Mengacu pada Undang-Undang (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) “Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga sebagai kepala tertinggi pemerintahan desa, dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.” Secara administratif, desa bukannya terdiri dari kepala desa dan perangkat lainnya, tetapi masyarakat masuk juga kedalamnya, yang merupakan bagian dari anggota yang dinamakan BPD.

Menurut Makarno (2017), Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para jajarannya yaitu Perangkat Desa, yang mewakili masyarakat guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman tentang pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Adapun menurut Umar (2016), Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan desa, yaitu: (1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, (2) Menjalankan tugas bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Berasaskan kepada;

- a) Kepastian hukum;
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

- c) Tertib kepentingan umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas;
- g) Akuntabilitas;
- h) Efektivitas dan efisiensi;
- i) Kearifan lokal;
- j) Keberagaman;
- k) Partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang melibatkan banyak aspek, meliputi perubahan dalam dinamika sosial, perubahan perspektif masyarakat terhadap kehidupan, dan perubahan pada sistem hukum, politik dan juga sistem pemerintahan. Selain itu pembangunan mencakup perubahan tingkat kesejahteraan, penghapusan ketimpangan sosial, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta penghapusan kemiskinan. Dalam proses pembangunan ini,

warga negara terus berupaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan (shortterm) dan (long-term) yang mereka inginkan. (Mukhlis, 2009).

Menurut Simamora (2006:67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Sahroni (2004:59), bahwa pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Phillips Roupp yang dikutip Khairuddin (1992), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada yang lebih berarti. Adapun pendapat Mizra (Khairuddin, 1992) mengemukakan bahwa Pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial maupun tentang manusia.

Pembangunan merupakan prosedur multifaset yang meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional, serta peningkatan pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ialah suatu prosedur yang berkesinambungan, bertahap, serta terencana yang berorientasi dalam perkembangan serta perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta meliputi segala bagian kehidupan, baik fisik maupun psikis. (Siagian, 2012). Secara umum, pembangunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik serta pembangunan non fisik. Pembangunan fisik mengacu dalam pekerjaan yang dilakukan untuk menyediakan warga desa dengan

bermacam-macam fasilitas serta infrastruktur publik, misalnya gedung, jalan, saluran irigasi, serta infrastruktur lainnya. Pembangunan non fisik ialah pembangunan yang tidak terikat dalam penggunaan sumber daya manusia (Tarsila, 2015).

Menurut Mardikanto (2018:607) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya dengan dipimpin pemerintah baik pusat atau daerah dengan menggunakan teknologi terpilih dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Pokok pikiran yang ada dalam pembangunan adalah :

- a. Pembangunan sebagai proses yang terus berlanjut untuk mewujudkan perubahan lebih baik dalam situasi lingkungan maupun kehidupan masyarakat sehingga tercapai perbaikan mutu masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Proses pembangunan itu bukan bersifat alami melainkan proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Ada perencanaan, analisis masalah dan kebutuhan, tujuan yang dicapai dan alternatif tujuan sesuai Analisis SWOT.
- c. Proses perubahan yang ingin dicapai adalah perubahan yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk menghasilkan kondisi masyarakat yang peka terhadap masalah yang terjadi sehingga mampu mencari alternatif baik bersifat swakarsa, swadaya dan swadana.
- d. Pembangunan dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan hanya satu golongan atau kelompok tertentu saja karena itu pembangunan bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memutuskan, dan terlibat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan hasilnya oleh masyarakat.

- e. Pembangunan adalah membangun manusia itu sendiri dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan mutu hidup setiap masyarakat dan tidak menelantarkan manusia atau masyarakatnya.

Adapun menurut Ardilah (2014), pembangunan desa merupakan suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa. Sedangkan menurut Sanjaya (2013), pembangunan desa merupakan suatu proses dengan upaya masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2019:114) Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Heppy (2021:49) Pembangunan dalam aspek fisik pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa menjadi proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi tujuan pembangunan desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan juga kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas desa, dan memanfaatkan SDA dan ekologi yang berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pada hakekatnya pembangunan desa menitikberatkan pada persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mencapai keterpaduan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat desa. Hal tersebut, dilihat pendapatan, pengeluaran, rencana, kegiatan dan kebutuhan swadaya masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Pembangunan desa dilaksanakan upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi;

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan Kawasan Pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/desa
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna
- d. Pemberdayaan Masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan top down dan bottom-up. Pendekatan pembangunan top down (dari atas ke bawah) masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang bersifat vital atau terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, sedangkan pendekatan bottom-up. Perencanaan semacam

ini membuat masyarakat langsung yang menentukan apa yang direncanakan, dengan cara apa akan dilakukan dan yang paling menjadi dasarnya adalah perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga kegunaan dari pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat berarti dan berguna bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun pengertian pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (9) bahwa “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dan dalam PERMENDAGRI pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa “Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Dimana rencana kegiatan pembangunan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dari ke 4 (empat) bidang tersebut, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menjalankan dan juga melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dari ke 4 bidang tersebut dimana sudah tertuang dalam PERMENDAGRI pasal 6 ayat 2,3,4,5 sebagai berikut;

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain;
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa

- b. Pendataan desa
 - c. Penyusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain;
- a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
 - a) Tambatan perahu
 - b) Jalan permukiman
 - c) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - e) Lingkungan permukiman masyarakat desa
 - f) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
 - b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - a) Air bersih berskala desa
 - b) Sanitasi lingkungan
 - c) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - a) Taman bacaan masyarakat
 - b) Pendidikan anak usia dini
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

- e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - a) Pasar desa
 - b) Pembentukan dan pengembangan BUMDes
 - c) Penguatan permodalan BUMDes
 - d) Pembibitan tanaman pangan
 - e) Penggilingan padi
 - f) Lumbung desa
 - g) Pembukaan lahan pertanian
 - h) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa
 - e. Pelestarian lingkungan hidup
 - a) Penghijauan
 - b) Pembuatan terasering
 - c) Pemeliharaan hutan bakau
 - d) Perlindungan mata air
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai
 - f) Perlindungan terumbu karang
 - g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
 - a. Pembinaan lembaga masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain;
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan

- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif
 - c) Kelompok perempuan
 - d) Kelompok tani
 - e) Kelompok masyarakat miskin
 - f) Kelompok nelayan
 - g) Kelompok pengerajin
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i) Kelompok pemuda
 - j) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

3. Strategi

Kuncoro (2005:12) mengatakan “Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Selanjutnya Wheelen dan Hunger (2012) mengatakan bahwa strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan. Lain halnya dengan Bintoro (1982) yang berpendapat bahwa strategi merupakan keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai tujuan untuk mengatasi permasalahan, dimana didalam strategi itu terdapat metode dan teknik.

Menurut Michael Porter dalam (Lailiani, 2017), dijabarkan bahwa strategi merupakan hal unik dan posisinya bernilai, melibatkan seperangkat kegiatan yang berbeda. Ketika kita telah memberikan atau menawarkan hal dengan cara yang berbeda dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, maka hal tersebut disebut strategi. Menurut Abdillah (2017), mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea,2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi.

Menurut Jack Kooten (1991:81), tipe – tipe strategi meliputi:

- a) Corporate Strategy (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai – nilai, dan inisiatif – inisiatif strategi yang baru. Pembatasan – pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b) Program Strategy (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi – implikasi strategi dari program tertentu. Kira – kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
- c) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya
- d) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategi.

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan Perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh Perusahaan. Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan Perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Kemudian menurut Mintzberg (Afiff dan Abdullah, 2010:54-55) strategi memiliki konsep yang sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- a) Perencanaan untuk memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuantujuan jangka panjangnya.
- b) Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsisten ataupun inkonsistensi prilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c) Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d) Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya.
- e) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Adapun pengertian tentang strategi publik menurut Geoff Mulgan (2009:19) menyatakan bahwa “public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods (strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik)”. Berdasarkan pengertian diatas, Geoff Mulgan menguraikan strategi kedalam 5 (lima) indikator yaitu;

1. Tujuan (purposes)
2. Lingkungan (environments)

3. Pengarahan (directions)
4. Tindakan (action)
5. Belajar (learning)

Strategi pembangunan desa menurut (Handayani & Awza, 2016), merupakan bagian dari pembangunan desa secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. Maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa terdapat empat strategi, yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan
2. Strategi Kesejahteraan
3. Strategi Responsif terhadap kebutuhan masyarakat
4. Strategi terpadu dan menyeluruh

4. Governmentality

Konsep governmentality berasal dari karya Michel Foucault Governmentality terdiri dari konsep pemerintahan dan rasionalitas. Dalam hal ini, government dipahami bukan hanya sebagai kekuatan yang perlu dijinakkan atau otoritas yang perlu dilegitimasi, melainkan adalah suatu kegiatan dan seni yang menyangkut semua pihak dan menyentuh dari masing-masing elemen (Burchell et al., 1991). Dengan demikian, pemerintah tidak terbatas pada struktur kelembagaan otoritas saja. Sebaliknya, konsep governmentality dimaknai sebagai fenomena empiris yang meresap dan memiliki karakteristik yang tetap spesifik untuk praktik dan organisasi tertentu.

Sedangkan dalam hal ini, rasionalitas dipahami sebagai kebutuhan untuk mengetahui apa yang sedang diatur untuk mengarahkan aktivitas menuju pencapaian tujuan tertentu dari organisasi (Neu, 2006). Sebelumnya, governmentality menekankan pada operasi kekuasaan pemerintah "action at a distance" mungkin dilakukan dalam manajemen melalui terjemahan realitas yang jauh ke dalam bentuk yang stabil, bergerak, dan dapat digabungkan (Robson,

1992). Namun baru-baru ini penekanan konsep governmentality dari gagasan Foucault bertransformasi menjadi government yang digambarkan sebagai "a particular, regulatory game of freedom and security" (Esmark, 2018).

Konsep gagasan tersebut yang diterapkan dalam penelitian terkait dengan audit internal ini. Terkait dengan perumusan dasar konseptual peran audit internal dalam tata kelola perusahaan adalah fungsi audit internal dalam membantu manajemen dan dewan direksi untuk mengelola risiko perusahaan. Konsep governmentality dari Michel Foucault berasal dari konsep government dan rationality. Dalam hal government, perlu dipahami baik secara epistemik maupun status etis dari fenomena ini sebagai "seni" daripada pelaksanaan otoritas yang sah. Sejalan dengan konsep governmentality, rasionalitas mengacu pada sentralitas dalam mengetahui apa yang diatur untuk memastikan tujuan dapat terpenuhi (Townley, 1993).

Dengan menggabungkan istilah pemerintahan dan rasionalitas. Pemerintah dalam pengertian ini mengacu pada perilaku, atau aktivitas yang dimaksudkan untuk membentuk, membimbing, atau mempengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku memiliki makna di luar bentuk memimpin dan mengarahkan. Hal ini juga mengacu pada "perilaku diri sendiri" di mana rasa mengatur diri sendiri adalah kekuatan yang membimbingnya. Rasionalitas yang merupakan suatu bentuk pemikiran yang berusaha sistematis dan jelas tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi atau seharusnya terjadi, menyatakan bahwa sebelum orang atau sesuatu dapat dikendalikan atau dikelola, terlebih dahulu harus didefinisikan. Oleh karena itu, negara merancang sistem untuk mendefinisikan populasi, yang membuat mereka diketahui dan terlihat. Hal ini mencakup mekanisme manajemen dan administrasi (proses kerja, prosedur, aturan) dan cara mengklasifikasikan individu atau kelompok (berdasarkan kategori pendapatan, ras, profesional dan personel), yang memungkinkan identifikasi, klasifikasi, pemesanan, dan kontrol.

G. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan atas pemilihan ini karena metode deskriptif kualitatif menggambarkan atau merumuskan semua data yang didapat dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh hasil atau kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan study fenomenologi penggalian data didasarkan atas pengalaman. Penelitian ini penulis memahami dan menggali berbagai fenomena yang dialami sebagai masyarakat setempat.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data diartikan sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyidikan. Jadi yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek penelitian.

- a) Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarakan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Sedangkan, pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008;98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

- b) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

3) Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:95) Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjeleajahi obyek/situasi sosial. Pertimbangan pemilihan informan tetap mempertimbangkan (a) kredibilitas informasi yang ditunjukkan dengan lama waktu dan ketepatan penggalian informasi (substansial engagement), (b) pengujian informasi yang bersumber dari kesamaan maupun perbedaan keterangan dari informan lain dalam hal yang sejenis (triangulation), (c) pendalaman khusus pada informasi yang berbeda tajam antara satu informan dan informan lainnya (negative cases analysis), dan (d) otentisitas yang ditunjukkan dari penguasaan informan terhadap kelengkapan dan ketepatan informasi (fairness).

Seperti yang telah disebut bahwa pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama harus dilakukan secara cermat. Tentunya pemilihan informan tersebut yang di anggap memiliki informasi bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar tetapi juga memahami secara teknis dan detail tentang masalah akan diteliti. Karena penelitian ini

mengkaji tentang Pembangunan Pemerintah Condongcatur yang berbasis Rukun Warga, maka peneliti memutuskan informan atau subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 1. 2 Data Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Reno Candra Sangaji, S.IP., M.I.P	Lurah	S2
2.	Margiyanta SE	Ulu-Ulu	S1
3.	Wanda Wira Sahputra SE	Staf Ulu-Ulu	S1
4.	Apri Nugroho S.I.P	Staf Pangripta	S1
5.	Bapak Nuryanto	Dukuh Gejayan	S2
6.	Sri Wahyuni	Sekretaris BPKal	
7.	Paijan Trisno Harjono	Ketua RW 18	SLTA
8.	Giyanto	Ketua RW 11	SLTA
9.	Sunarmin	Ketua RT 02, RW 29	SLTA
10.	Novi	Masyarakat	
11.	Setyabudi	Masyarakat	
12.	Tri Rahayu	Masyarakat	SD

Sumber: Data Primer, 2024

Dari informan-informan diatas sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Baik dari Lurah beserta Perangkat Desa, BPD, Lembaga Pemerintahan Desa dan termasuk RW dikarenakan peneliti yakin bahwasanya pemilihan informan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan tersebut dianggap memiliki peran dan tugasnya masing-masing, yang tentunya sesuai dengan penelitian yaitu mengkaji tentang percepatan pembangunan berbasis Rukun Warga.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menjadi langkah yang sangat penting dalam melakukan peneelitan agar peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpul data.

1. Wawancara

Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Subyek (*responden*) adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri. Apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (*wawancara dan angket*) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (*situasi, kondisi*). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Disamping wawancara, penelitian juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Menurut Supardi “Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Teknik observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Selain terlibat secara langsung observasi dapat dilakukan secara tidak langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perubahan atau peristiwa.

- a. Observasi secara langsung; dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek ditempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa
 - b. Observasi secara tidak langsung; dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa atau objek yang akan diteliti. misalnya pemerolehan data dari film, foto rekorder dan lain sebagainya
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang digunakan untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu;

- a. Dokumen Primer ; adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa.
- b. Dokumen sekunder ; adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain

Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi swadaya masyarakat juga menjadi bagian dari penelitian ini, seperti laporan penelitian atau survei tentang kondisi sosial, budaya, dan agama di Kalurahan Condongcatur, buku panduan tentang praktik kepemimpinan efektif dalam menghadapi heterogenitas masyarakat, artikel atau jurnal ilmiah mengenai kepemimpinan lokal dan pengelolaan keberagaman masyarakat, informasi dan promosi terkait program pembangunan berbasis rukun warga di Kalurahan Condongcatur, serta hasil riset atau evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berbasis rukun warga di berbagai wilayah

5) Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah ada data yang berkaitan dengan penelitian, maka disusun dan diklasifikasikan dengan menggunakan data-data yang diperoleh untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif tentunya dengan menerapkan teknik analisis data yang tepat maka akan semakin banyak informasi dapat diurutkan dan akan membantu kita untuk mendapatkan pandangan lebih jelas dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu.

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah dengan interactive model, yang komponen kerjanya meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Reduksi data merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan

atau memperoleh pokok temuan. Penyajian data (data display) merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami. Penarikan kesimpulan, kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitas.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kalurahan Condongcatur

1. Sejarah

Condongcatur sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Depoik, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum tahun 1946, wilayah Desa/Kalurahan Condongcatur yang sekarang ini ada, pada mulanya merupakan wilayah dari 4 (empat) kalurahan, masing-masing adalah: (1) Kalurahan Manukan dipimpin Jayeng Sumarto, (2) Kalurahan Gorongan dipimpin Rng. Hadi Prasajo, (3) Kalurahan Gejayan dipimpin Sastro Diharjo, (3) Kalurahan kentungan dipimpin Kromoredjo. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, keempat Kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu "Kalurahan otonom" dengan nama Condongcatur. Penetapan ini secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan. Kalurahan Condongcatur resmi berdiri pada tanggal 26 Desember 1946.

Selanjutnya, seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, jabatan Lurah Desa diganti menjadi Kepala Desa. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KPTS/1986, tanggal 12 Agustus 1986. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, terjadi perubahan kembali. Selanjutnya, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan, jabatan Kepala Desa diganti kembali menjadi Lurah. Adapun Lurah/Kepala Desa Condongcatur yang menjabat sebagai berikut: 1) Kromo Redjo (1946 – 1984), 2) H. Kuwat Hadi Cusnanto (1985 – 1995), 3) H Sukris (1996 – 2009), 4) Marsudi (2009 – 2015), 4) Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP (2015 – sekarang).

2. Visi dan Misi

Visi Kepala Desa merupakan pandangan jangka panjang yang menjadi tujuan atau cita-cita dalam pengelolaan pemerintahan desa. Visi ini mencerminkan arah dan sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027, dimana Setiap Kepala Desa dapat memiliki visi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan potensi desa tersebut. Berikut adalah Visi Kepala Desa Condongcatur berdasarkan RPJMKal tahun 2022-2027;

“Terwujudnya Kalurahan Condongcatur yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat “ .

Dalam visi ini, Kepala Desa Condongcatur menggambarkan keinginan untuk menjadikan desa sebagai tempat yang Sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup mandiri dan berkembang. Visi ini ditekankan pada nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Kepala desa berkomitmen untuk menggerakkan masyarakat dalam upaya bersama mencapai kesejahteraan dan perkembangan desa yang berkelanjutan. Maka dari itu, upaya untuk mewujudkan visi tersebut perlu misi yang merupakan penjabaran dari visi dan merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan di Kalurahan Condogcatur, yakni sebagai berikut:

1. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem layanan berbasis IT
2. Mempertahankan Kesejahteraan dan Kinerja Pamong Kalurahan beserta Staff Kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan
3. Mempertahankan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan
4. Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (transparansi)
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik Kalurahan / Polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
7. Mendorong peran perempuan di masyarakat dalam rangka realisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
8. Optimalisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, Karangtaruna, RT/RW, LPMK, Posyandu)
9. Pengembangan Kampung KB, Ramah Anak, RTH dan Padukuhan Bersinar
10. Pemberian ruang dan fasilitas bagi disabilitas
11. Meningkatkan dan Mempertahankan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggungjawab
12. Optimalisasi keamanan lingkungan melalui Linmas dan Kelompok Jaga Warga
13. Merealisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
14. Penyampaian Bantuan Pembangunan kepada 64 RW di 18 Padukuhan sebesar Rp.40.000.000 per tahun
15. Menjalinkan Kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima

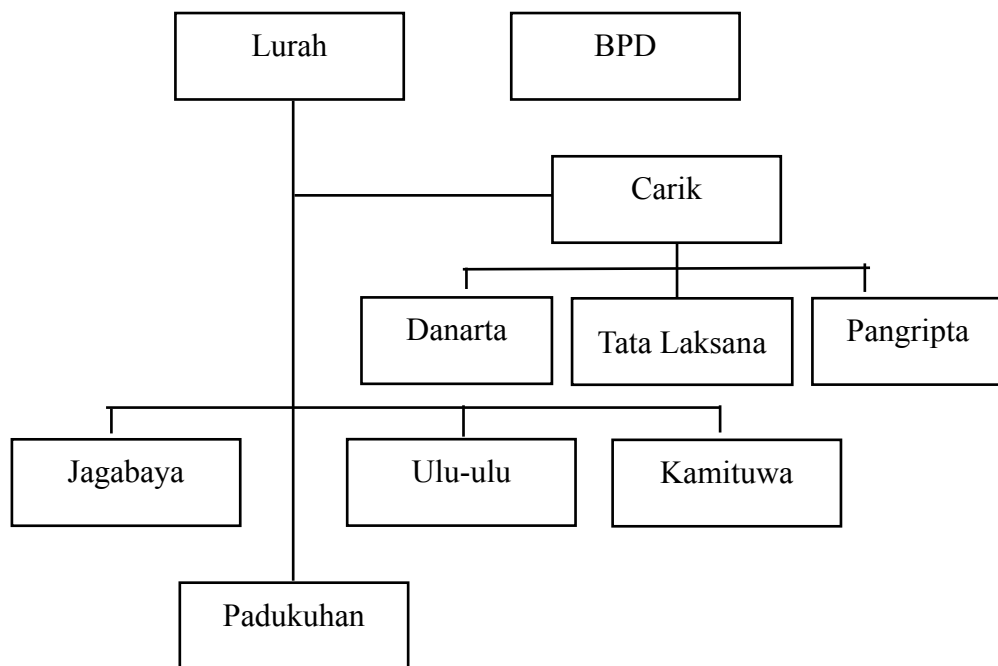
16. Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan Spiritual dan adat istiadat secara mandiri

3. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Pasal 5 mengatakan bahwa Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerinthanan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayaan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang Kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada masyarakat.

Berdasarkan Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur sebagai berikut;

Bagan 2. 1 Struktur Oragnisasi Kalurahan Condongcatur



Sumber: data porfil Kalurahan Condongcatur

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Condongcatur di atas, bahwa Kepala Desa (Lurah) dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik), dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU Dan Umum (Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan (Danarta), Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Dusun (Dukuh) yang ada di Kalurahan Condongcatur juga diketuai oleh satu Kepala Dusun.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai berikut;

1. Lurah

Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Dalam Peraturan Bupati Sleman pasal 4 Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh pemerintah DIY. Untuk melaksanakan tugas, lurah memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata praja Pemerintahan
 - b. penetapan peraturan di kalurahan
 - c. pembinaan masalah pertanahan
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - f. pelaksanaan administrasi kependudukan dan
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana kalurahan
 - b. pembangunan bidang pendidikan dan
 - c. Pembangunan bidang kesehatan.
- 3) Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. pembinaan partisipasi masyarakat
 - c. pembinaan sosial budaya masyarakat
 - d. pembinaan keagamaan dan
 - e. pembinaan ketenagakerjaan.
- 4) Lurah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sosialisasi dan motivasi di bidang:
 - a. Budaya
 - b. Ekonomi
 - c. Politik
 - d. lingkungan hidup
 - e. pemberdayaan keluarga
 - f. pemuda
 - g. olahraga dan
 - h. karang taruna.
- 5) Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan
 - b. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan
 - c. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang tata ruang dan
 - d. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

2. Carik

Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan. Carik bertugas membantu lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), carik mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan umum
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, dan
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan

3. Tata laksana

Penata laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum. Tata laksana mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan
- b. pelaksanaan penataan administrasi pamong kalurahan
- c. penyediaan prasarana pamong kalurahan dan kantor
- d. pengadministrasian aset, inventarisasi, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas
- e. pelayanan data, informasi, dan kehumasan
- f. pelayanan administrasi perjalanan dinas
- g. pemeliharaan kantor dan sarana prasana pemerintahan kalurahan
- h. penyiapan rapat, pelayanan akomodasi, konsumsi, materi, dan kelengkapan rapat
- i. pelayanan umum
- j. pengelolaan data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan
- k. pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan dan
- l. pelayanan legalisasi administrasi kependudukan.

4. Danarta

Danarta mempunyai tugas membantu Carik dalam melaksanakan urusan keuangan. Danarta mempunyai fungsi, sebagai berikut;

- a. pengelolaan administrasi keuangan
- b. pengelolaan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
- c. verifikasi administrasi keuangan
- d. pengelolaan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya
- e. pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kalurahan
- f. pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak bumi dan bangunan dan
- g. penyusunan laporan keuangan pemerintah kalurahan.

5. Pangripta

Pangrita mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan perencanaan. Pangripta mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan kalurahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
- b. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; c. penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
- c. inventarisasi data dalam rangka pembangunan
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan profil kalurahan
- e. monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kalurahan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah kalurahan dan pertanggungjawaban Lurah.

6. Keamanan

Keamanan (Jagabaya) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Jagabaya memiliki fungsi, sebagai berikut;

- a. pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan
- b. penyusunan rancangan regulasi kalurahan
- c. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e. pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- f. penataan dan pengelolaan wilayah
- g. perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan
- h. pelaksanaan pemilihan Lurah, pengisian Pamong Kalurahan, dan pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- i. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
- j. pengelolaan administrasi tanah kalurahan
- k. pembinaan penanganan bencana
- l. pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan
- m. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- o. pelaksanaan kerjasama kalurahan dan
- p. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

7. Kemakmuran

Kemakmuran (Ulu-Ulu) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dibidang pembangunan. Ulu-ulu mempunyai fungsi, sebagai berikut;

- a. penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kalurahan
- b. penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan
- d. pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana dan prasarana pemerintah kalurahan
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana pengairan
- f. pembinaan lingkungan hidup kalurahan
- g. pembinaan usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan kalurahan
- h. pembinaan usaha perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah
- i. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan
- j. pembinaan dan pengelolaan pasar kalurahan, dan Badan Usaha Milik Kalurahan.

8. Sosial

Sosial (Kamituwa) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dibidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Kamituwa memiliki fungsi sebagai berikut;

- a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- c. pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, perempuan, dan perlindungan anak

- d. pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan, dan ketenagakerjaan;
- e. pembinaan kegiatan, budaya, dan pariwisata
- f. pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan administrasi nikah, cerai, dan rujukdan
- g. melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan

9. Dukuh

Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan. Dukuh mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban
- b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan
- c. penataan dan pengelolaan wilayah
- d. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan
- e. pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- g. pelayanan administrasi kependudukan masyarakat padukuhan
- h. pembinaan pemanfaatan prasarana dan sarana padukuhan
- i. pembinaan sosial dan kemasyarakatan padukuhan
- j. pembinaan lembaga tingkat padukuhan
- k. penyampaian informasi kepada masyarakat padukuhan
- l. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- m. pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan
- n. pelestarian kebudayaan.

5. Kondisi Geografis

Kalurahan Condongcatur adalah sebuah Kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

yang mana pada awal terbentuknya atas penggabungan dari 4 (empat) wilayah Kalurahan lama yaitu :

1. Kalurahan Manukan
2. Kalurahan Gorongan
3. Kalurahan Gejayan
4. Kalurahan Kentungan

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tahun 1946, 4 (empat) Kalurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Condongcatur dan berdasarkan perubahan nomenklatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan menjadi Kalurahan Condongcatur meliputi 18 Padukuhan yang terdiri dari 64 RW dan 211 RT. Wilayah Kalurahan Condongcatur secara geografis sangat strategis, dilalui jalan arteri (Ring road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Condongcatur pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Kalurahan Condongcatur memiliki wilayah seluas ± 950.000 Ha. Keberadaan Kalurahan Condongcatur di Jalur lingkaran utara mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun bidang kependudukan.

Adapun secara ringkas data Kalurahan Condongcatur adalah sebagai berikut :

2. Luas Wilayah Kalurahan Condongcatur

- a. Luas Kalurahan Condongcatur : ± 950.000 Ha. Terdiri dari :

Tabel 2. 1 Luas Kalurahan Condongcatur

1.	Sawah	:	246.4305 Ha
2.	Perkarangan	:	593.6339 Ha

3.	Tegal/Ladang	:	8.3165 Ha
4.	Embung/Kolam	:	11.6565 Ha
5.	Lain-Lain	:	89.9626 Ha

Sumber: Data diolah Kalurahan Condongcatur

Kalurahan Condongcatur memiliki luas ± 950.000 Ha yang terdiri dari perkarangan (593.6339 Ha), sawah (246.4305 Ha), Ladang (8.3165 Ha), embung/kolam (11.6565 Ha) dan lain-lain (89.9626)

b. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah yang ada di Kalurahan Condongcatur sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik

Sebelah Timur : Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok

Sebelah Selatan : Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok

Sebelah Barat : Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati

3. Keadaan Wilayah

Kalurahan Condongcatur merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kalurahan yang berada di Kapanewon Depok yang terdiri dari 18 Padukuhan, 64 RW dan 211 RT

4. Keadaan Geografis

a. Keadaan Alam

- 1) Ketinggian dari permukaan laut : ± 250 M
- 2) Curah hujan rata-rata tiap tahun : 2.500-3.000 mm
- 3) Topografi : Dataran rendah
- 4) Suhu udara rata-rata : 26°C s/d 32° C

5. Orbitase (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan)

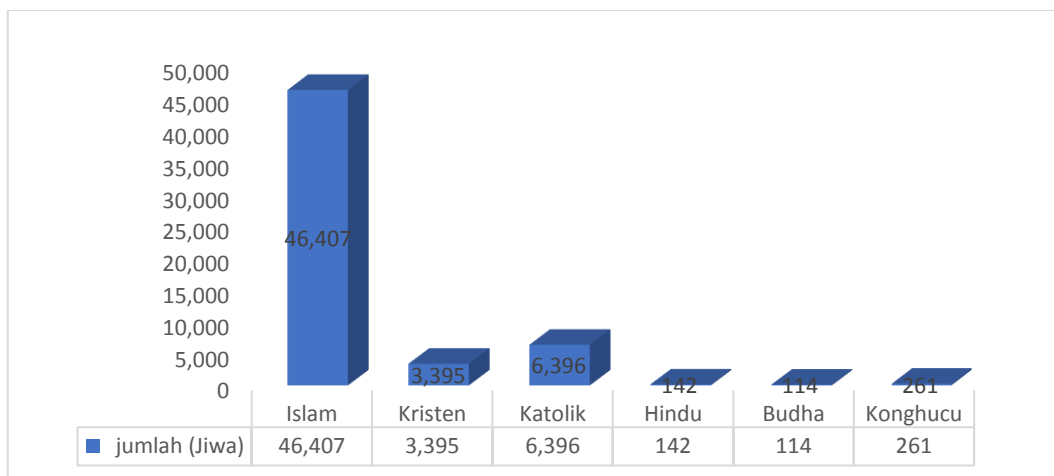
- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,4 Km.

- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 8,5 Km.
- 3) Jarak dari Ibokota Provinsi : 7,1 Km.
- 4) Jarak dari Ibukota Negara : 536.

6. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur Tahun 2023 menurut hasil adminitrasi pelayan adalah 56.715 jiwa dengan perkembangan penduduk stabil, penduduk Kalurahan Condongcatur pada umumnya menggunakan bahasa indonesia karena merupakan pusat pendidikan dari daerah-daerah diseluruh indonesia, sedangkan mayoritas penduduk adalah beragama Islam (46.407) dan lainnya adalah agama Kristen (3.395), Katolik (6.396), budha (114), Hindu (142), Konghucu (261) dan aliran kepercayaan. Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama;

Grafik 2. 1 Penduduk Berdasarkan Agama



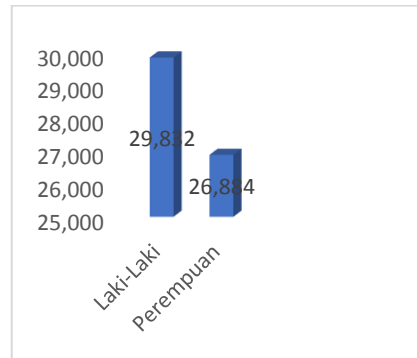
Sumber: Website Kalurahan Condongcatur 2023

- 1. Jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan Desember 2023 :
 - a) Jumlah Jiwa

Berdasarkan data sekunder Kalurahan Condongcatur tahun 2023 memiliki jumlah penduduk 56.715 jiwa. Dimana mayoritas penduduk yang ada di Kalurahan Condongcatur. Berikut jumlah penduduk;

- a) Laki-laki 29.831
- b) Perempuan 26.884

Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Website Kalurahan Condongcatur 2023

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan

Berikut jumlah penduduk di Kalurahan Condongcatur berdasarkan status pernikahan;

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan

No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1.	Kawin	28.249	15.334	12.915
2.	Belum Kawin	24.486	13.516	10.970
3.	Cerai Mati	2.933	547	2.386
4.	Cerai Hidup	1.048	435	613

Sumber: Website Kalurahan Condongcatur 2023

Jumlah penduduk berdasarkan status nikah, penduduk di condongcatur lebih banyak masyarakat yang telah menikah yaitu 28.249 Jiwa yang terdiri laki-laki (15.334) jiwa dan Perempuan (12.915) yang telah menikah atau kawin. Sementara itu penduduk yang belum kawin 24.486 jiwa, yang terdiri laki-laki (13.516) dan perempuan (10.970). tidak hanya itu berdasarkan data masyarakat di

Kalurahan Condongcatur berstatus cerai mati 2.933 yang terdiri dari laki-laki (547) dan Perempuan (2.386), dan cerai hidup 1.048 jiwa yang terdiri dari laki-laki (435) dan Perempuan (613).

c) Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur berdasarkan Tingkat Pendidikan;

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	8.489
2.	Taman Kanak-kanak	3.489
3.	Sekolah Dasar	4.204
4.	SLTP	4.499
5.	SLTA	14.942
6.	Diploma	664
7.	Akademi	2.569
8.	Strata 1	7.973
9.	Strata 2	1.295
10.	Strata 3	319

Sumber; data diolah Kalurahan Condongcatur

Berdasarkan data tersebut Tingkat Pendidikan di Kalurahan Condongcatur mayoritas tingkat Pendidikan SLTA (14.942), Strata 1 (7.973), SLTP (4.499), Sekolah Dasar (4.204), taman kanak (3.489), Akademisi (2.569), Strata 2 (1.295), Diploma (664), Strata 3 (319) dan penduduk Kalurahan Condongcatur tidak atau belum sekolah (8.489). data-data tersebut melihat kualitas atau mutu dari penduduk di Kalurahan Condongcatur

2. Mutasi penduduk

Mutasi penduduk merupakan perubahan dalam jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk, yang mencakup berbagai perubahan demografis yang terjadi dalam populasi termasuk kelahiran, kematian, migrasi dan pergerakan penduduk. Berikut mutasi penduduk Kalurahan Condongcatur;

- a) Pindah : Laki-laki (323 Jiwa), Perempuan (409 Jiwa)
- b) Datang : Laki-laki (426 Jiwa), Perempuan (289 Jiwa)
- c) Lahir : Laki-laki (178 Jiwa), Perempuan (152 Jiwa)
- d) Meninggal : Laki-laki (164 Jiwa), Perempuan (177 Jiwa)

3. Pertumbuhan penduduk

Peningkatan jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur;

- Laki-laki : 180 Jiwa
- Perempuan : 170 Jiwa

7. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari investigasi aspek ekonomi dan mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur sangat bervariasi, tetapi mayoritas adalah berdagang atau penjual jasa yang didominasi oleh warga Masyarakat pendatang karena mengungat banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kalurahan Condongcatur.

1. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Condongcatur sangat bervariasi, terdapat beberapa jenis pekerjaan masyarakat Condongcatur sebagai berikut;

Tabel 2. 4 Mata Pencarian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan		Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	:	1.917 Orang
2.	TNI	:	1.066 orang
3.	Polri	:	242 Orang

No	Jenis Pekerjaan		Jumlah
4.	Pedagang	:	2.690 Orang
5.	Petani/pekebun	:	253 Orang
6.	Peternak	:	11 Orang
7.	Industri	:	69 Orang
8.	Konstruksi	:	116 Orang
9.	Transportasi	:	43 Orang
10.	Karyawan Swasta	:	7.459 Orang
11.	Karyawan BUMN	:	318 Orang
12.	Karyawan BUMD	:	50 Orang
13.	Karyawan Honorer	:	116 Orang
14.	Buruh harian Lepas	:	1.504 Orang
15.	Buruh Tani/Perkebunan	:	206 Orang
16.	Buruh Nelayan/Perikanan	:	1 Orang
17.	Buruh Peternakan	:	7 Orang
18.	Pembantu Rumah Tangga	:	47 Orang
19.	Tukang Cukur	:	3 Orang
20.	Tukang Listrik	:	10 Orang
21.	Tukang Las	:	13 Orang
22.	Tukang Jahit	:	61 Orang
23.	Tukang Kayu	:	32 Orang
24.	Tukang Sol Sepatu	:	2 Orang

No	Jenis Pekerjaan		Jumlah
25.	Tukang Las/Pandai Besi	:	13 Orang
26.	Tukang Jahit	:	61 Orang
27.	Tukang Rias	:	10 Orang
28.	Penata Busana	:	7 Orang
29.	Penata Rambut	:	10 Orang
30.	Mekanik	:	48 Orang
31.	Seniman	:	41 Orang
32.	Tabib	:	1 Orang
33.	Perancang Busana	:	5 Orang
34.	Peterjemah	:	2 Orang
35.	Pendeta	:	9 Orang
36.	Pastor	:	22 Orang
37.	Ustad/Mubaliq	:	5 Orang
38.	Wartawan	:	31Orang
39.	Juru Masak	:	9 Orang
40.	Dosen	:	495 Orang
41.	Guru	:	465 Orang
42.	Pengacara	:	29 Orang
43.	Notaris	:	14 Orang
44.	Arsitek	:	37 Orang
45.	Akuntan	:	5 Orang

No	Jenis Pekerjaan		Jumlah
46.	Konsultan	:	26 Orang
47.	Dokter	:	234 Orang
48.	Bidan	:	11 Orang
49.	Perawat	:	71 Orang
50.	Wiraswasta	:	4.751 Orang
51.	Lain-lain	:	1.365 Orang

Sumber; data diolah Kalurahan Condongcatur

Berdasarkan data tersebut menunjukkan beragamnya jenis mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur, termasuk ASN dan non ASN. Terdapat berbagai profesi seperti PNS, TNI, POLRI, Pedagang, Petani, Wiraswasta, dokter, guru dan masih banyak lainnya. Penduduk Kalurahan sendiri memiliki mayoritas pekerjaan Karyawan Swasta (7.459), Wiraswasta (4.751), Pedagang (2.690), PNS (1.917) dan lain-lainnya. Kehadiran variasi profesi ini memiliki dampak positif terhadap pendapatan dan mengurangi Tingkat kemiskinan di Kalurahan Condongcatur.

2. Fasilitas yang ada di Kalurahan Condongcatur

a. Fasilitas Pendidikan dan sosial

1. Fasilitas Pendidikan

Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas Pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat mulai dari tempat kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SLB C, dan juga pondok pesantren.

Tabel 2. 5 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Kelompok bermain	20

2.	Taman kanak-kanak	18
3.	Sekolah dasar	15
4.	SMP	5
5.	SMA	3
6.	Perguruan tinggi	5
7.	SLB C	1
8.	Pondok pesantren	5

sumber; data diolah Kalurahan Condongcatur

berdasarkan data Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas Pendidikan, kelompok bermain (20) taman kanak-kanak (18), SD (15), SMP (5), SMA (SMA), perguruan tinggi (5), SLB C (1), dan juga pondok pesantren (5). Fasilitas-fasilitas tersebut guna dapat membantu dalam memberikan dorongan kepada masyarakat dalam pentingnya pendidikan.

2. Fasilitas Peribadatan

Berikut jumlah fasilitas rumah peribadatan yang ada di Kalurahan Condongcatur;

Tabel 2. 6 Jumlah Fasilitas Rumah Peribatan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	83
2.	Musholla	20
3.	Gereja Kristen	2
4.	Gereja Katholik	4
5.	Kapel Katholik	3
6.	Kuil	0

Sumber; data diolah Kalurahan Condongcatur

Di Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas tempat peribadatan, seperti Masjid (83 buah), Musholla (20 buah), Gereja Kristen (2 buah),

Gereja Katolik (4 buah), Kapel Katolik (3 buah). Dikarena mayoritas masyarakat Condongcatur beragama Islam jadi banyak fasilitas-fasilitas Masjid dan Musholla yang disediakan.

3. Fasilitas Kesehatan

Berikut fasilitas kesehatan yang ada di Kalurahan Codongcatur yang dapat diakses oleh masyarakat setempat dan dilengkapi oleh tenaga-tenaga kesehatan

Tabel 2. 7 Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Rumah sakit	2
2.	Rumah bersalin/BKIA	12
3.	PUSKESMAS	1
4.	PUSKESMAS pembantu	1
5.	Apotik/Depo obat	16
6.	Dokter praktek	52
7.	Bidan	19

Sumber; data diolah Kalurahan Condongcatur

Fasilitas-fasilitas Kesehatan tidak hanya 1 di Kalurahan tetapi banyak fasilitas yang ada di Condongcatur seperti Rumah Sakit (2), rumah bersalin (12), PUSKESMAS (1), PUSKESMAS Pembantu (1), Apotik (16), Dokter praktek (52), Bidan (19) dan juga tenaga-tenaga Kesehatan di Kalurahan Condongcatur, guna untuk memudahkan masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya Kesehatan.

4. Fasilitas Umum

Berikut fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kalurahan Condongcatur yang dapat dikunjungi oleh masyarakat setempat, maupun dari luar;

Tabel 2. 8 Jumlah Fasilitas Umum

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Pemandian/Kolam renang	6
2.	Hutan kota	-
3.	Tempat pertunjukan kesenian	1
4.	Tempat rekreasi sejara/alam	2
5.	Penginapan	20
6.	Hotel	6
7.	Restoran	12

Sumber: data diolah Kalurahan Condongcatur

Tidak hanya itu fasilitas umum yang dapat di nikmati oleh semua kalangan masyarakat seperti kolam renang, tempat pertunjukan seni, tempat rekreasi, penginapan, hotel dan juga restoran. Fasilitas-fasilitas tersebut juga dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

5. Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian di Kalurahan Condongcatur dapat membantu peningkatan masyarakat. Berikut fasilitas-fasilitas perekonomian di Kalurahan Condongcatur:

Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Perekonomian

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Pasar umum	2
2.	Koperasi simpan pinjam	11
3.	KUD	1
4.	Toko	260
5.	Warung	557
6.	Bank	5
7.	Badan-badan kredit	9

Sumber: data diolah Kalurahan Condongcatur

Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat seperti pasar umum (2), Koperasi simpan pinjam (11), KUD (1), warung (557), toko (260), bank (5), dan badan-badan kredit (9). Guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM.

B. Program-Program Pembangunan di Kalurahan Condongcatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 mengatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa mencakup hak dan kewajiban desa, sementara pengelolaan keuangan desa melibatkan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk segala bentuk kekayaan terkait dengan kegiatan desa. Ini mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Agar visi, misi, dan program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dapat tercapai, dibutuhkan dukungan penganggaran. Penyusunan RPJMKal mempertimbangkan kemungkinan dari sisi kemampuan anggaran desa, yang dinyatakan dalam pagu atau plafon indikatif anggaran desa. Penganggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan visi, misi, dan program. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan(RPJMKal) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu subsatansi RPJMKal mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan Kalurahan, dan

meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, perlu menggali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa. Identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan diperlukan. Sumber daya ini dapat dikembangkan menjadi pendukung utama kegiatan yang menghasilkan nilai tambah berdaya saing tinggi, mendukung kemandirian desa. Untuk mencapai pembangunan wilayah yang diharapkan, perlu dirumuskan kebijakan pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi serta strategi Kalurahan.

Program-program pembangunan Kalurahan Condongcatur 2022-2027 sebagai berikut;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa merupakan pondasi utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dan melayani kepentingan serta kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dengan mengelola secara efektif bidang ini, pemerintah desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Program pembangunan Kalurahan Condongcatur dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut;

- 1) Peningkatan Kinerja Pamong Kalurahan; Melakukan pelatihan khusus yang menggali potensi lokal dalam kepemimpinan dan manajemen desa, mengadakan forum diskusi rutin dengan warga untuk mendengar masukan dan umpan balik terkait dengan kinerja pemerintah desa
- 2) Optimalisasi fungsi pelayanan kepada masyarakat; mendirikan pusat pelayanan informasi desa yang dimudah diakses oleh masyarakat, dan juga mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk mempermudah akses informasi dan pengajuan permohonan administrasi

- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kalurahan; dengan membangun portal transparansi anggaran desa yang memungkinkan mengakses informasi anggaran dan pengeluaran desa secara real time dan serta mengadakan rapat terbuka secara berkala untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa
- 4) Peningkatan kapasitas Pamong dan Lembaga Kalurahan: untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Condongcatur menyelenggarakan program pelatihan dan workshop reguler untuk meningkatkan keterampilan manajemen, administrasi, dan kepemimpinan bagi Pamong dan staf desa. Dan juga membentuk jaringan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan organisasi non-profit untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi serangkaian kegiatan dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan desa secara menyeluruh, berikut program pembangunan Kalurahan Condongcatur dalam bidang penyelenggaraan pembangunan desa;

- 1) Pembangunan infrastruktur di Wilayah Padukuhan dan kantor Kalurahan; dengan menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pembangunan sarana dan prasarana, Gedung pertemuan warga, Gedung olahraga, jalan, drainase, resapan dan saluran air hujan guna mengantisipasi banjir dan memperlancar perekonomian masyarakat. Dan juga melibatkan aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur
- 2) Pengamanan aset Kalurahan yang ada di bantaran Sungai; dengan mengadakan program pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap aset-aset desa yang berada di sekitaran Sungai

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkuat hubungan sosial, budaya dan ekonomi antar individu, kelompok dan komunitas

di suatu wilayah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, membangun solidaritas, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, prioritas program pemerintah Condongcatur sebagai berikut;

- 1) Pembinaan kesenian Daerah, Religi dan Modern; dengan mengorganisir pertunjukan seni dan budaya lokal secara berkala untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi desa dengan mendukung pelatihan seni dan kerajinan tradisional sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya
- 2) Pembinaan kepada kelompok-kelompok ekonomi (koperasi dll); memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen usaha kelompok-kelompok ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha, dan juga mendorong kolaborasi antara koperasi dan pelaku usaha kecil dengan pelatihan keterampilan dan akses ke pasar yang lebih luas.
- 3) Pembinaan kesadaran dan Pendidikan masyarakat; Pendidikan Informal, mengadakan pelatihan, lokakarya, dan sesi penyuluhan tentang berbagai isu penting seperti Kesehatan, Pendidikan, lingkungan dan hak asasi manusia. Kampanye kesadaran, mengorganisir kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial, lingkungan dan Kesehatan
- 4) Pemberdayaan Perempuan dan anak-anak; menyelenggarakan program pelatihan keterampilan untuk Perempuan agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dan juga melakukan Pendidikan gender, dengan mengadakan Pendidikan program Pendidikan dan kesadaran gender untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak
- 5) Pembinaan kesukarelawan dan kepemimpinan masyarakat; pengembangan organisasi masyarakat, mendukung pemberntukan dan pengembangan organisasi masyarakat sipil. Dengan menyelenggarakan pelatihan

kepemimpinan dan manajemen untuk anggota masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pembangunan desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan control masyarakat terhadap proses-proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut pemberian bantuan atau bantuan langsung, tetapi lebih pada memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menentukan arah dan implentasi program-program pembangunan. berikut adalah prioritas pembangunan kalurahan Condongcatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

- 1) Pendidikan dan pelatihan; keterampilan kepemimpinan, untuk membantu masyarakat mengelola proyek dan inisiatif lokal mereka sendiri, dan juga memberikan keterampilan teknis, untuk membantu masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi dan sosial
 - 2) Pemberdayaan ekonomi; pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), untuk mendorong pengembangan usah kecil dan menengah di Tingkat lokal untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga pengembangan koperasi, untuk mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai sarana untuk mengakses sumber daya dan pasar yang lebih besar
- #### 5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Kalurahan

Bidang penanggulangan bencana merupakan upaya untuk meminimalkan dampak bencana alam atau buatan manusia melalui berbagai strategi pencegahan, mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan. Bidang penanggulangan bencana dikemas dengan kegiatan untuk siap siaga jika terjadi hal-hal kebencanaan di wilayah Kalurahan Condongcatur;

- 1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana; pemetaan resiko, Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan terhadap bencana di wilayah tertentu dan menyusun peta risiko. Dan pengelolaan lingkungan, memperkuat kelestarian lingkungan, termasuk pemeliharaan hutan, sungai, dan lahan, untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
- 2) Persiapan dan Kesiapsiagaan; pengembangan rencana darurat, mengembangkan rencana darurat yang terinci untuk berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Dan juga memberikan pelatihan dan simulasi, dengan pelatihan reguler dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, petugas bencana, dan relawan.
- 3) Tanggap Darurat; evakuasi dan penyelamatan, Mengkoordinasikan operasi evakuasi dan penyelamatan untuk menyelamatkan korban bencana dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dan pengelolaan Shelter dan bantuan darurat, dengan menyediakan tempat perlindungan sementara, makanan, air bersih, perawatan medis, dan bantuan lainnya kepada korban bencana.
- 4) Kerjasama dan Koordinasi; Kerjasama antarlembaga, membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana, dengan memastikan koordinasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan dalam menangani bencana dan menyediakan bantuan kepada korban.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data dan pembahasan yang telah dilakukan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Staregi pembangunan berbasis RW yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur dengan menggunakan konsep strategi menurut Geoff Mulgan telah berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan. Dengan strategi pembangunan berbasis Rw maka pembangunan di Kalurahan Condongcatur dapat di lakukan pembangunan secara merata dan berkeadilan.

Percepatan pembangunan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses pembangunan suatu negara atau wilayah. Proses ini melibatkan sejumlah langkah dan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Dengan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini menjadi program unggulan Pemerintahan Kalurahan Condongcatur, seperti halnya kebijakan Pemerintahan Condongcatur mengubah konsep Pembangunan dari berbasis padukuhan diberalih menjadi berbasis Rukun Warga, yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 6 Tahun 2021 Bab IV, Kerangka Pemikiran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Condongcatur, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kalurahan Condongcatur memberikan bantuan dana kepada 64 RW masing-masing sebesar Rp 40.000.000,- per tahun.

Stretegi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcarur dengan melakukan Pembangunan berbasis RW merupakan inovasi yang baru dan berbeda. Pembangunan berbasis RW ini merupakan solusi untuk mengatasi

permasalahan dalam Pembangunan berbasis Padukuhan. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan serta mengatasi masalah kemiskinan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder untuk memastikan keberhasilan, efektivitas dan dampak kebijakan Pembangunan berbasis Rukun Warga. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan kebijakan agar mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa depan. Banyak keberhasilan yang dicapai Kalurahan Condongcatur dengan Pembangunan berbasis Rukun Warga meliputi peningkatan Infrastruktur dan fasilitas publik, akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan. Hal ini menandai bahwa kebijakan yang dilakukan berdampak positif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian data, fakta dan informasi yang ditemukan peneliti serta kesimpulan yang peneliti dapat ditarik maka; pembangunan berbasis RW di Kalurahan Condongcatur perlu dipertahankan bahkan pada beberapa RW anggaran pembangunan perlu ditingkatkan untuk merealisasikan rencana yang menjadi usulan warga. Dengan demikian, tidak ada saran khusus terkait dengan Strategi percepatan pembangunan di Condongcatur dikarenakan seluruh indikator yang peneliti gunakan untuk melihat strategi percepatan pembangunan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Kalurahan diluar Kalurahan Condongcatur dapat belajar untuk melakukan percepatan pembangunan didaerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Devi, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4.2 (2020), 29–33 <<https://doi.org/10.36057/jips.v4i2.409>>
- Apriliani, Susi, and Ismsar, 'Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Volume 3.Nomor 2 (2023), 5298–5037
- Armawan, Iwan, 'Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat', *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2022), 64–74 <<https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i1.20>>
- H, Ahmad., Abdul Rajab., and Muh. Marwan Malik, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Insfrastruktur', *Inovasi:Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, Volume 19.Nomor 3 (2023), 689–701
- Halawa, Epianu, and Fransiskus Pascal Bali, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli', *Jurnal Governnance Opinion*, 5.2 (2020), 76–83
- Jauhariah, Jauhariah, and Martinus Syamsudin, 'Perencanaan Pembangunan', *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21.1 (2023), 135–47 <<https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>>
- Kasmira, Alyas, and Sudarmi, 'Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, Volume 1.Nomor 3 (2020), 818–33 <<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>>
- Kodrianingsih, Wafiq Laelatul, Rispawati Rispawati, and Bagdawansyah Alqadri, 'Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap

- Pembangunan Di Desa Aikmel', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 6.Nomor 7 (2023), 5384–91 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2459>>
- Laia, Hastra Aminoto, and Andi Randhika Perangin Angin, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi', *Jurnal Governance Opinion*, Volume 5.nomor 2 (2020), 100–107
- Lasa, Lasarus, and Kaja Kaja, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa', *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20.2 (2022), 301–12 <<https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638>>
- Mani, Syifa Al, and Lucyana Trimo, 'Faktor Pendorong Dan Penghambat Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian Di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut', *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7.1 (2021), 973 <<https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4898>>
- Mono, Asdar, and Rijel Samaloisa, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman', *TheJournalish: Social and Government*, Volume 3.Nomor 2 (2022), 113–21 <<https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259>>
- Novitasari, Martinus Legowo, and Katon Galih Setyawan, 'Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Kebonagagung Pasca Gempa Bumi', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5.1 (2022), 69–81 <<https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i1.1532>>
- Nur Arifah, Miratun, and Nugrahani Kusumastuti, 'Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2.1 (2019), 169–88 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>>
- Nuri Aliyani, and Ade Yunita Mafruhah, 'Strategi Percepatan Pembangunan Desa Berkembang: Upaya Menuju Desa Mandiri Yang Berkelanjutan', *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1.2 (2022), 145–57 <<https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.514>>

- Poluan, Karina, Florence D. J. Lengkong, and Very Y. Londa, 'Efektivitas Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)', *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado*, VII.111 (2021), 166–76
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/36291>>
- Ruru, Alter Maykel, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Marhaen Ruru, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.95 (2020), 30–36
- Sabrina, R, 'Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume 22.Nomor 1 (2022), 53–61
<<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10200>>
- Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, 'Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1.Nomor 1 (2022), 18–33
<<https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>>
- Sari, cica Nopika, Meyzi Heryanto, and Zaili Rusli, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga', *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15.Nomor 1 (2018), 135–41
- Se, Hyronimus, Maria Helena Carolinda Dua Mea Sedi, and Maria Ermelinda, 'Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada', *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Volume 11.Nomor 1 (2021), 37–52
<<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/21408>>
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa

Salsabilla, and Yohana Manulang, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021), 295–302 <<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>>

Sondakh, Heppy, Michael Mantiri, and Ventje Kasenda, 'Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Governance*, Volume 1.Nomor 1 (2021), 1–8

Sukwika, Tatan, 'Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Volume 6.Nomor 2 (2018), 115 <<https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>>

Sutopo, Dhanny Septimawan, (2023). 'Memahami Pembangunan Desa Dan Prespektifnya', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.6 (2023), 21917–22

Tay, Dicky Siswanto Renggi, and Sugeng Rusmiwari, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.4 (2019), 217–22

Tesis

Nuryanto, (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berbasis Rukun Warga (study kasus di Kalurahan Condongcatur , Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). (Tesis Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD")

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
8. Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027
10. Peraturan Lurah Condongcatur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2024

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa strategi yang digunakan Pemerintah Condongcatur dalam Percepatan pembangunan?
2. Bagaimana cara pemerintah Kalurahan dalam penyampaian kebijakan pembangunan berbasis RW?
3. Apa tujuan pemerintah condongcatur menggunakan pembangunan berbasis RW dalam melakukan percepatan pembangunan?
4. Mengapa percepatan pembangunan menggunakan berbasis RW?
5. apa yang menjadi prioritas program pembangunan berbasis RW?
6. Perubahan lingkungan seperti apa yang terjadi dengan adanya pembangunan berbasis RW?
7. Pengarahan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan?
8. Tindakan apa yang diambil pemerintah condongcatur dalam mengambil Keputusan kebijakan pembangunan berbasis RW?
9. Bagaimana pemerintah condongcatur mengambil sikap dalam Tindakan pengambilan keputusan?
10. Bagaimana pemerintah condongcatur melihat suatu keberhasilan pembangunan tersebut?
11. Bagaimana dalam menentukan skala prioritas pembangunan berbasis RW?
12. Bagaimana cara pemerintah Condongcatur dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan?
13. Apa yang menjadi pendorong motivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan?
14. Apakah lembaga Kalurahan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan?
15. Bagaimana pemerintah kalurahan membuka ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya?
16. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas dari pemerintah dalam pembangunan yang besar. Apa solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut?

17. Bagaimana Swadaya masyarakat mengambil perannya dalam pembangunan?
18. Apa yang dilakukan jika pendanaan dari swadaya masyarakat yang pendapatan yang tidak sama antar masyarakat
19. Apa yang masyarakat rasakan dari program pemerintah?
20. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan?

DAFTAR OBSERVASI

No	Uraian Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Kantor Kalurahan	✓		Kondisi Kantor Kalurahan Bagus, berada di Jl. Anggajaya No. 1 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta
2.	Struktur Organisasi Desa	✓		Ada
3.	RPJMKal	✓		Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027
4.	APBKal	✓		Peraturan Lurah Condongcatur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2024
5.	Website Kalurahan	✓		https://condongcatursid.slemankab.go.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Susunan Jabatan Kalurahan Condongcatur

No	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Lurah	Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP.	Kentungan
2.	Carik	Riska Dian Nur Lestari, S.TP, M.Sc.	Gejayan
3.	Jagabaya	Rusmanto Wagiman, S.H.	Leles Ngringin
4.	Ulu-Ulu	Murgiyanta, SE.	Leles Ngringin
5.	Kamituwa	Al Thouvik Sofisalam, Amd.	Sanggrahan
6.	Kaur. Danarta	-	-
7.	Kaur. Pangripta	Wahyu Nurendra	Ngropoh
8.	Kaur. Tata Laksana	Fernadya Riski Hartantri, ST.	Pikgondang
9.	Dukuh Tiyasan	Suratman	Pojok Tiyasan
10.	Dukuh Manukan	Beti Kartiningrum, ST MT	Manukan
11.	Dukuh Pondok	Irfani Reza Pahlevi,S.Pd.M.Pd	Pondok
12.	Dukuh Sanggrahan	Suparman	Sanggrahan
13.	Dukuh Gempol	Ari Susanti, ST	Gempol
14.	Dukuh Dero	Ribut Suparman, AMd.	Mancasan Dero
15.	Dukuh Ngringin	Muji Purwanto, Amd.	Ngringin
16.	Dukuh Ngropoh	Drs. Mujiyono	Nglaren Ngropoh
17.	Dukuh Dabag	H. A. Sunaryo	Dabag
18.	Dukuh Gejayan	H. Nuryanto. S.Pd.	Gejayan
19.	Dukuh Kaliwaru	Widyatmoko	Prayan Wetan
20.	Dukuh Soropadan	Salahnudin Kamal, S.Pd.	Soropadan
21.	Dukuh Pringwulung	Sahid Fahrudin	Pringwulung
22.	Dukuh Kayen	Purwanto	Kayen
23.	Dukuh Kentungan	Suhartini	Kentungan
24.	Dukuh Pikgondang	Tri Setiawan, S.Hum.	Pohruboh
25.	Dukuh Gandok	Supriyono Atmojo	Panden Gandok
26.	Dukuh Joho	Retnaningsih	Joho
27.	Sraf Carik	Wasana, SH	Kayen
28.	Staf Pangripta	Apri Nugroho, S.I.P.	Cepit Soropadan
29.	Staf Danarta	Eko Kadaryanto, SE	Pondok
30.	Staf Danarta	Erna Setyaningsih H, S.Pdi.	Sambirejo Gempol
31.	Staf Tatalaksana	Sudarna, BA	Pandean Gandok
32.	Staf Tatalaksana	Marsana	Sambisari Joho
33.	Staf Tatalaksana	Surono	Gejayan
34.	Staf Tatalaksana	Ririn Ardiana, A.Md Ak.	Pondok
35.	Staf Tatalaksana	Tri Sugiyanto	Ngringin

No	Jabatan	Nama	Alamat
36.	Staf Tatalaksana	Nefdia Erlina	Manukan
37.	Staf Tatalaksana	Amalia Dah Ayu Kiranti, ST	Karangasem Gempol
38.	Staf Jagabaya	H. A. Trisusetyanto, SIP.	Nglaren Ngropoh
39.	Staf Jagabaya	Heri Supriyono	Dabag
40.	Staf Jagabaya	Rudi Antariksawan	Karangasem Gempol
41.	Staf Ulu-Ulu	Heri Sunanta	Ngropoh
42.	Staf Ulu-Ulu	Felicita Erma Gista	Puren Pringwulung
43.	Staf Ulu-Ulu	Wanda Wira Sahputra, SE.	Pringwulung
44.	Staf Kamituwa	Nur Amalina Dwi Astuti, S.Si.	Kentungan
45.	Staf Kamituwa	Candra Widianoro, Amd.	Pondok

Data Padukuhan, Kalurahan Condongcatur terdiri dari 18 Padukuhan dan dibagi menjadi 64 RW dan 211 Rt ;

No	Padukuhan	RW	RT
1.	Tiyasan	2	6
2.	Manukan	4	9
3.	Pondok	2	6
4.	Sanggrahan	3	8
5.	Gempol	3	18
6.	Dero	5	28
7.	Ngringin	5	18
8.	Ngropoh	4	10
9.	Dabag	3	10
10.	Gejayan	4	10
11.	Kaliwaru	3	7
12.	Soropadan	3	11
13.	Pringwulung	4	15
14.	Kayen	4	14
15.	Kentungan	5	11
16.	Pikgondang	3	11
17.	Gandok	3	10
18.	Joho	4	10
Jumlah		64	211

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Lurah



Wawancara bersama Sekretaris BPKal



Wawancara bersama staf Ulu-ulu



Wawancara bersama Ulu-Ulu



Wawancara bersama Dukung Gejayan



Wawancara bersama Staf Pangripta



Wawancara bersama RW 11



Wawancara bersama RW 18



Wawancara bersama RT 02 (29)



Foto bersama ibu RT 02 setelah melakukan wawancara



Foto bersama Ibu Novi setelah melakukan wawancara



foto bersama Bapak Setyabudi setelah melakukan wawancara